

**KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH
DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SMP NEGERI 1 BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh :

JOKO PRAMONO
NIM. Q 100 120 088

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014

**KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM
PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SMP NEGERI 1 BATURETNO**

NASKAH PUBLIKASI

Telah diajukan oleh

Nama : Joko Pramono

NIM : Q100120088

Hari :

Tanggal :


Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Bambang Sumardjoko

Pembimbing II



Dra. Haryatmi, M.Si

**SCHOOL LEADERSHIP IN THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL-BASED
MANAGEMENT IN SMP NEGERI 1 BATURETNO WONOGIRI REGENCY**

Email : jpramono69@yahoo.co.id

ABSTRACT

The problem studied in this research are as follows: (1) how school leadership in the implementation of school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno? (2) How are principals in improving the implementation of school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno? (3) How does the achievement of school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno ? (4) What factors inhibiting the principal's leadership in the implementation of school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno? This research was conducted in SMP Negeri 1 Baturetno 2012/2013 school year. This study used a qualitative research approach. The informants are principals, vice-principals, teachers, school committees and students of SMP Negeri 1 Baturetno. The technique of collecting data using interviews, observasi and documentation. Analysis of the data using an interactive model. The conclusions of this study are as follows: (1) the principal's leadership in the implementation of school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno, includes components of curriculum and instructional programs, staff, student, education infrastructure, finance, management, school and community relations and special services management education institutions. (2) Efforts to improve the performance of principals in school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno, including delegation and distribution of authority, decision-making, policy-setting process, developing communication patterns, supervise and motivate and build a conducive working atmosphere. (3) Access the implementation of school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno, include: improving the quality, independence, participation and transparency. (4) Factors that inhibit the principal's leadership in the implementation of school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno, including the role of society, not all teachers are able to implement school policies, yet the growing culture of quality, bureaucratic and political mechanisms that are less directional .

Key Word: school leadership, school-based management

**KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH DI SMP NEGERI 1 BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI**

Email : jpramono69@yahoo.co.id

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri? (2) Bagaimanakah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri? (3) Bagaimanakah capaian pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri? (4) Faktor-faktor apakah yang menghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri? Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Baturetno tahun pelajaran 2012/2013. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah dan siswa SMP Negeri 1 Baturetno. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri, meliputi komponen kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, keuangan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat dan manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. (2) Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri, meliputi pelimpahan dan distribusi kewenangan, pembuatan keputusan, proses penetapan kebijakan, membangun pola komunikasi, melakukan pengawasan dan memberikan motivasi dan membangun suasana kerja yang kondusif. (3) Capaian pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri, meliputi: peningkatan mutu, kemandirian, partisipasi dan transparansi. (4) Faktor-faktor yang menghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri, meliputi: peran serta masyarakat, belum semua guru mampu menerapkan kebijakan sekolah, belum tumbuhnya budaya mutu, birokrasi dan mekanisme politik yang kurang terarah.

Kata Kunci : Kepemimpinan Kepala Sekolah, MBS

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum menggembirakan, disatu sisi sejumlah siswa mampu menjadi juara disejumlah ajang kompetisi ilmiah tingkat dunia, namun disisi lain cukup banyak siswa yang memiliki kemampuan dasar matematika, sains dan bahasa, masih rendah. Sejumlah survey yang dilakukan lembaga internasional menempatkan siswa Indonesia di peringkat bawah (Dharma, 2009: 22). Dalam rangka meningkatkan mutu manajemen sekolah, salah satu diantaranya melalui kebijakan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan suatu pendekatan peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian wewenang kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Direktorat Pembinaan SMP yang bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa melalui MBS telah terjadi peningkatan mutu pendidikan di sekolah, melalui MBS telah terjadi perbaikan tata pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah, baik partisipasi, transparansi, akuntabilitas, maupun kemandirian dalam pengembangan program dan pembiayaan (Depdiknas, 2007: 2).

Keberhasilan implementasi MBS dipengaruhi oleh berbagai faktor, satu diantaranya yang sangat menentukan adalah Kepala Sekolah. Pelaksanaan MBS menuntut kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan

pendidikan (Mulyasa, 2011: 57). Salah satu pola kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam MBS adalah pola kepemimpinan transformasional (Danim, 2009: 47). Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa pimpinan, staf, bawahan, guru, fasilitas, dana, dan faktor-faktor keorganisasian (Danim, 2009: 219). Seorang pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas, dan gambaran holistik tentang bagaimana organisasi di masa depan ketika semua tujuan dan sasaran telah tercapai.

Kepala Sekolah harus memenuhi lima aspek kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Temuan Direktorat PMPTK Departemen Pendidikan Nasional setelah melakukan uji kompetensi berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah untuk penguasaan masing-masing kompetensi adalah; kompetensi kepribadian 0,67; kompetensi manajerial 0,47; kompetensi supervisi 0,40; kompetensi sosial 0,64; dan kompetensi kewirausahaan 0,55. Kesimpulannya, masih banyak Kepala Sekolah lemah di bidang kompetensi manajerial dan supervisi, padahal kompetensi manajerial dan supervisi merupakan kekuatan Kepala Sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik (Dharma, 2009: 42).

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri karena memiliki akreditasi A dan sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di wilayah sub rayon 03 Baturetno Kabupaten Wonogiri. Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari pengelolaan sekolah yang dilakukan dengan baik oleh Kepala Sekolah beserta guru. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri berjalan dengan baik.

Pokok permasalahan yang diteliti adalah peran Kepala Sekolah dalam pelaksanaan MBS. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah kepemimpinan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan MBS, bagaimanakah upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan pelaksanaan MBS, bagaimanakah capaian pelaksanaan MBS, faktor-faktor apakah yang menghambat kepemimpinan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan MBS

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kepemimpinan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan MBS, mendeskripsikan upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan pelaksanaan MBS, mendeskripsikan capaian pelaksanaan MBS, mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat kepemimpinan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan MBS.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Baturetno tahun pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah

dan siswa SMP Negeri 1 Baturetno. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri

Peran Kepala Sekolah melakukan mengembangkan kurikulum dengan menetapkan tujuan pendidikan sebagaimana tertuang pada KTSP SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri tahun 2012 – 2013 dengan berpedoman pada UU No 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005, Permendiknas No. 22 Tahun 2006, dan Permendiknas No. 23 Tahun 2006.

Peran Kepala Sekolah dalam program pengajaran bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Program pengajaran melalui sistem paket dengan beban mengajar melalui sistem tatap muka dengan 40 jam pelajaran per minggu, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur maksimal 18 jam pelajaran per minggu. Hal tersebut telah sesuai dengan praktek-praktek Manajemen Berbasis Sekolah yang diamanatkan pada Permendiknas 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan.

Peran Kepala Sekolah dalam bidang tenaga kependidikan adalah mendayagunakan seluruh personel secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tercapai secara optimal. Peran tersebut

telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Peran Kepala Sekolah dalam bidang kesiswaan melakukan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan siswa mulai dari masuk sampai dengan siswa keluar atau lulus dari SMP Negeri 1 Baturetno. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2011: 46) yang menyatakan manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran disekolah berjalan lancar, tertip, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Sedikitnya terdapat tiga tugas yang harus dilakukan yaitu kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan kemajuan belajar, dan bimbingan dan pembinaan disiplin.

Peran Kepala Sekolah dalam pengelolaan sarana prasarana menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan serta kebersihan umum, usaha melengkapi yang berupa antara lain gedung (ruangan sekolah), lapangan tempat bermain, kebun dan halaman sekolah, meubel sekolah, alat-alat pelajaran klasikal dan alat peraga, perpustakaan sekolah, alat-alat permainan dan rekreasi, fasilitas pemeliharaan sekolah, perlengkapan bagi penyelenggaraan khusus, transportasi sekolah, dan alat-alat komunikasi. Peran ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Peran kepala sekolah dalam bidang penggunaan keuangan adalah mengatur pengelolaan keuangan sekolah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2011: 47) bahwa komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Maka setiap kegiatan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan.

Peran Kepala Sekolah dalam bidang hubungan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat, yaitu dengan melibatkan orang tua, dan masyarakat serta isu-isu yang timbul dan bagaimana menyelesaikan isu-isu tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan pengelolaan pendidikan menjadi tanggung-jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Peran Kepala Sekolah dalam bidang pelayanan khusus meliputi layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, dan manajemen layanan kafetaria/kantin sekolah. Layanan-layanan tersebut di kelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri

Kepala Sekolah dalam pelimpahan kewenangan selalu menyertakan rincian tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang

mendukung, aturan yang jelas, dan sistem pengendalian mutu yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan praktek Manajemen Berbasis Sekolah yang dirumuskan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan.

Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah kecuali dalam hal-hal tertentu yang emergensi, mengambil keputusan dengan mengambil resiko terkecil, dan kemaslahatan yang banyak dengan meminta masukan dari para pembantu kepala sekolah. Hal ini sesuai pendapat Ulber Silalahi (2010: 380) yang menyatakan alasan pentingnya komunikasi dari bawah ke pimpinan antara lain, pertama pimpinan mendapatkan informasi yang di perlukan untuk menilai berbagai kekurangan, sebagai bahan pengambilan keputusan dan mungkin untuk memperbaiki komunikasi ke bawah, terutama melalui beberapa jenis balikan. Balikan ini perlu untuk menentukan apakah pegawai-pegawai telah menerima atau mengerti pesan-pesan yang di sampaikan kepada mereka. Kedua, tanpa mekanisme komunikasi ke atas melalui mana pegawai yang lebih rendah dapat mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat atau usul, menyatakan rasa tidak puas, menyatakan keluhan atau mengajukan saran-saran mengenai kebijakan yang telah di tetapkan.

Kepala Sekolah dalam proses penetapan kebijakan melaksanakan rapat khusus untuk menampung usulan dan aspirasi. Dalam hal ini sesuai dengan Depdiknas (2007 : 45-46) yang mengatakan bahwa salah satu rasionalitas penerapan MBS adalah untuk membuat kebijakan/ keputusan menjadi lebih

dekat dengan *stakeholders* sehingga hasilnya benar-benar merupakan aspirasi *stakeholders*. Untuk itu MBS mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan keputusan sekolah benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders*. Penggalakan partisipasi dilandasi keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, maka makin tinggi rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab dan makin besar pula tingkat dedikasi/ kontribusinya.

Kepala Sekolah dalam membangun pola komunikasi melakukan komunikasi dua arah dengan baik dengan warga sekolah ataupun dengan masyarakat. Kepala sekolah menjelaskan kepada semua *stakeholder* semua program yang telah, sedang dan akan dilakukan agar dipahami oleh semua pihak. Hal ini sesuai pendapat Suprihatin (2004: 100) yang menyatakan upaya membina komunikasi intern tidak sekedar untuk menciptakan kondisi yang menarik dan hangat, tetapi akan mendapatkan makna yang mendalam dan berarti bagi pendidikan dalam suatu sekolah.

Kepala Sekolah melakukan supervise pendidikan, dengan langkah-langkah antara lain; melaksanakan program supervisi melalui adanya program supervisi kelas, dadakan (inspeksi) dan kegiatan ekstrakurikuler. Supervisi dilakukan dengan membuat instrumen guna mengukur tingkat keberhasilannya. Kepala sekolah memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja guru dan karyawan maupun untuk pengembangan Sekolah. Hasil supervisi

dikomunikasikan agar menjadi timbal balik bagi kepentingan lembaga ataupun kepentingan peningkatan kualitas guru atau karyawan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2011 : 157), supervisi pada hakekatnya mengandung beberapa kegiatan pokok, yaitu pembinaan yang kontinu, pengembangan kemampuan profesional personal, perbaikan situasi belajar mengajar, dengan sasaran akhir pencapaian tujuan dan pertumbuhan pribadi peserta didik.

Kepala sekolah dalam memberikan motivasi mempertimbangkan rasa keadilan dan kelayakan karena hal ini penting bagi Kepala sekolah untuk menciptakan iklim yang kondusif. Motivasi diberikan dalam bentuk hadiah atau hukuman baik fisik maupun non-fisik. Hal senada dikatakan Wahjosumidjo (2001), peran kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh sumberdaya yang ada di sekolah sehingga melahirkan etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan.

Capaian pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri

Capaian yang pertama adalah peningkatan mutu yaitu meningkatnya prestasi siswa, tingkat keamanan dan ketertiban sekolah, ketertiban dari pihak PTK ataupun siswa.

Capaian yang kedua adalah kemandirian yaitu sekolah tampak diberi kewenangan atau otonomi untuk merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri dan mengevaluasi sendiri keseluruhan program kerjanya dengan melibatkan seluruh elemen terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini sesuai

dengan makna Manajemen Berbasis Sekolah adalah satu pendekatan manajemen yang menempatkan mutu pendidikan sebagai kiblat aktifitas manajemen kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan dan peran serta masyarakat sekolah.

Capaian yang ketiga adalah partisipasi yaitu model pengelolaan sekolah yang sangat menekankan pada partisipasi seluruh elemen terkait dengan peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Capaian yang keempat adalah transparansi yaitu keterbukaan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat dan pemerintah

Keempat capaian tersebut telah sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah yang dipesankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007

Faktor-faktor yang menghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri

Peran serta masyarakat selama ini pada umumnya masih sebatas dana, sedangkan dukungan lain dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kurang diperhatikan, yaitu peran dewan pendidikan dan komite sekolah. Faktor eksternal yang akan turut menentukan keberhasilan MBS adalah peran masyarakat yang tidak hanya dalam bentuk partisipasi orang tua siswa, melainkan juga masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat,

lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Hal ini belum sesuai dengan undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 4 disebutkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Belum semua guru mampu menerapkan kebijakan sekolah, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini belum sesuai dengan pendapat Isjoni (2009: 13) mengungkapkan bahwa sebaiknya guru membantu siswa memahami materi yang sulit, bekerjasama, membantu teman dan menumbuhkan kemampuan berfikir kritis. Berfikir kritis adalah suatu proses terorganisasi yang dipergunakan di dalam aktivitas mental, misalnya pemecahan masalah, pembuatan keputusan, meyakinkan dan menganalisa asumsi.

Kurang tumbuhnya budaya kualitas baik dari segi input, proses maupun output pendidikan merupakan faktor penghambat tumbuhnya kepala sekolah profesional. Dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas mencakup input, proses dan output pendidikan.

Kondisi birokrasi dan sistem politik kurang terarah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, beserta komponen yang tercakup di dalamnya. Mekanisme sistem politik yang kurang stabil dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara selain menimbulkan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan di masyarakat juga merupakan faktor

penghambat lahirnya kepala sekolah profesional. Wakil rakyat di dewan yang lamban dan tidak tepat dalam mengambil suatu keputusan melahirkan sistem politik yang kurang stabil dan kurang menguntungkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri telah berjalan dengan baik, meliputi tujuh komponen yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, keuangan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, dan manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan, (2) Upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri, meliputi pelimpahan dan distribusi kewenangan, pembuatan keputusan, proses penetapan kebijakan, membangun pola komunikasi, melakukan pengawasan dan memberikan motivasi dan membangun suasana kerja yang kondusif, (3) Capaian pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri, meliputi: peningkatan mutu, kemandirian, partisipasi dan transparansi, (4) Faktor-faktor yang menghambat kepemimpinan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri, meliputi: peran serta masyarakat, belum semua guru mampu menerapkan kebijakan sekolah, kurang tumbuhnya budaya mutu, birokrasi, dan mekanisme politik yang kurang terarah.

Berdasarkan simpulan sebagaimana diuraikan maka implikasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Jika Manajemen Berbasis Sekolah dilaksanakan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mutu sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri akan semakin meningkat, (2) Jika berbagai masalah yang menghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dapat ditekan atau diminimalisir, maka pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri berjalan dengan baik

Berdasarkan simpulan dan implikasi sebagaimana diuraikan diatas, maka saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, (2) Bagi guru agar meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya sehingga mampu menerapkan kebijakan sekolah, (3) Bagi Kepala Sekolah perlu menjaga dan meningkatkan komunikasi dan partisipasi yang telah berjalan dilakukan bersama warga sekolah melalui sosialisasi program-program dan tujuan yang terkait dengan pelaksanaan MBS dapat jelas dipahami oleh seluruh warga sekolah, sehingga dapat meningkatkan budaya mutu, (4) Bagi pemerintah agar menciptakan birokrasi dan mekanisme politik yang terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan dan Suparno. 2009. *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah: Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis, dan Internasionalisasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Isjoni. 2009. *Cooperativ Learning Mengembangkan Kemampuan Belajar Berkelompok*, Bandung: Alfabeta.
- Kemendiknas. 2011. *Buku Kerja Kepala Sekolah*. Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan.
- Mulyasa, E 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Suprihatin, MH.dkk. 2004. *Manajemen Sekolah*. Semarang: UPT MKK Universitas Negeri Semarang.
- Surya Dharma, 2009. *Menuju Tenaga Kependidikan Profesional*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen PMPTK.
- Ulber Silalahi. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahjosumidjo. 2001. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.